

Menelisik Dinamika Implementasi Fungsi Fasilitasi Peliputan Media Terhadap Kegiatan Pimpinan Daerah Kabupaten Sleman

(Penelitian pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah)

Yulia Nugraheni¹, Yuli Setyowati²

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD", Jalan Timoho 317 Yogyakarta

*Penulis koresponden: yulianugraheni.barinto@gmail.com, gracedista72@gmail.com

ABSTRAK

Pemerintah Daerah melalui humas pemerintah aktif memanfaatkan media sosial. Prokompim merupakan lembaga humas pemerintah yang melakukan fungsi manajemen komunikasi pimpinan daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilaksanakan pada Prokompim Sleman dengan tujuan mengetahui implementasi fungsi fasilitasi peliputan media terhadap kegiatan pimpinan daerah dan dinamika yang terjadi pada implementasi fungsi tersebut. Hasil penelitian mengungkap bahwa pelaksanaan fungsi fasilitasi peliputan media oleh Prokompim Sleman dilaksanakan melalui pendekatan kelembagaan yang terbagi ke dalam dua tim media. Tim Dokumentasi Pimpinan berperan sebagai entitas yang melekat secara struktural jabatan pimpinan daerah dengan fokus pada dokumentasi kegiatan resmi Bupati dan Wakil Bupati. Sedangkan Tim Media Bupati dan Tim Media Wakil Bupati bekerja lebih fleksibel dan bersifat personal, mengikuti gaya serta kebutuhan komunikasi masing-masing pimpinan. Namun, sistem ini belum sepenuhnya kokoh secara kelembagaan. Hal ini terlihat ketika terjadi pergantian kepala daerah hasil Pemilukada 2024. Tim media yang sebelumnya mendampingi pimpinan lama digantikan seluruhnya sehingga menciptakan situasi ketergantungan terhadap individu, bukan terhadap sistem. Dalam perspektif teori budaya organisasi, ketergantungan ini menandakan belum terbentuknya nilai-nilai bersama yang menjamin kontinuitas kerja. Lebih jauh, dari kacamata tata kelola adaptif, organisasi pemerintahan idealnya mampu mengakomodasi perubahan dengan tetap menjaga stabilitas fungsi. Pada kasus Prokompim, adaptasi dilakukan secara teknis (dengan merekrut tim baru), namun belum menyentuh sisi struktural dan sistemik. Tidak adanya standar atau regulasi yang menjadikan tim media sosial sebagai bagian tetap dari jabatan fungsional membuat proses komunikasi publik menjadi tidak berkelanjutan. Dengan demikian, Prokompim perlu memformalkan struktur peliputan yang melekat pada jabatan, bukan individu, untuk memastikan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Kata-kata Kunci: Dinamika Implementasi, Fungsi Fasilitasi, Tim Media, Humas, Prokompim

ABSTRACT

The Regional Government through government public relations actively utilizes social media. Prokompim is a government public relations institution that carries out the function of managing regional leadership communications. This study is a qualitative study conducted at Prokompim Sleman with the aim of determining the implementation of the media coverage facilitation function for regional leadership activities and the dynamics that occur in the implementation of this function. The results of the study revealed that the implementation of the media coverage facilitation function by Prokompim Sleman was carried out through an institutional approach divided into two media teams. The Leadership Documentation Team acts as an entity that is structurally attached to the regional leadership position with a focus on documenting the official activities of the Regent and Deputy Regent. Meanwhile, the Regent's Media Team and the Deputy Regent's Media Team work more flexibly and personally, following the style and communication needs of each leader. However, this system is not yet fully institutionally solid. This was seen when there was a change in regional heads as a result of the 2024 Regional Election. The media team that previously accompanied the old leader was completely replaced, creating a situation of dependency on individuals, not on the

system. From the perspective of organizational culture theory, this dependency indicates that shared values that guarantee work continuity have not yet been formed. Furthermore, from the perspective of adaptive governance, government organizations should ideally be able to accommodate change while maintaining functional stability. In the case of Prokompim, adaptation was carried out technically (by recruiting a new team), but had not touched on the structural and systemic aspects. The absence of standards or regulations that make the social media team a permanent part of the functional position makes the public communication process unsustainable. Thus, Prokompim needs to formalize the coverage structure that is attached to the position, not the individual, to ensure the principles of transparency and accountability.

Keywords: Implementation Dynamics, Facilitation Function, Media Team, Public Relations, Prokompim

PENDAHULUAN

Fenomena semakin meningkatnya pengguna media sosial memberikan peluang besar bagi instansi pemerintah untuk menggunakannya sebagai sarana menyampaikan informasi publik, mengomunikasikan kebijakan, rencana kerja, serta capaian kinerja kepada masyarakat luas. Berdasarkan laporan *We Are Social* dan *Kepios* (2024), jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia mencapai 139 juta orang, atau sekitar 49,2% dari total populasi, dan angka ini terus meningkat setiap tahunnya. Sejalan dengan itu, survei Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tahun 2023 mencatat bahwa lebih dari 80% instansi pemerintah pusat dan daerah telah memanfaatkan media sosial sebagai kanal utama komunikasi publik, termasuk untuk pelayanan administrasi digital, pelaporan pengaduan, hingga diseminasi program pembangunan. Pemanfaatan ini menunjukkan pergeseran paradigma komunikasi pemerintah dari yang bersifat satu arah menuju komunikasi interaktif dan partisipatif melalui media digital. Penggunaan media sosial telah membentuk dan mendukung cara baru dalam berkomunikasi, berinteraksi, dan berkolaborasi. Media sosial menawarkan cara yang lebih cepat dan tepat untuk berpartisipasi dalam pertukaran informasi melalui daring (dalam jaringan/online) (Adminkab, 2022).

Tidak hanya instansi pemerintah, pejabat publik baik pejabat politik maupun pejabat karier juga terlihat aktif menggunakan media sosial. Pejabat politik yang terlihat aktif menggunakan media sosial adalah Dedy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Sejalan dengan itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mempunyai media informasi utama yang memberikan informasi mengenai berbagai program, kebijakan dan kegiatan pemerintah daerah. Portal tersebut adalah portal jabarprov.go.id yang merupakan satu portal untuk semua hal tentang Jawa Barat, sedangkan Dedi Mulyadi sendiri sebagai Gubernur Jawa Barat mempunyai media sosial pribadi dengan akun Instagram miliknya @dedimulyadi71. Akun media sosial pribadi milik Dedi Mulyadi lebih menonjolkan *personal taste*. Aktivitas pribadi mendominasi postingan di akun media sosialnya. Hal ini menggambarkan bahwa baik pemerintah daerah maupun pejabat pimpinan daerah mempunyai media masing-masing dalam melakukan komunikasi dengan warga masyarakatnya.

Media sosial bagi instansi pemerintah merupakan sarana bagi organisasi untuk menyampaikan publikasi kepada masyarakat luas dan *stakeholder*. Sedangkan kepala daerah sebagai pejabat pimpinan daerah memanfaatkan media sosial sebagai media komunikasi efektif, dapat sebagai penyampai pesan atas program pemerintah di daerah yang dipimpinnya (kepala daerah sebagai kepala pemerintah daerah) dan dapat pula sebagai penyampai pesan politik (kepala daerah sebagai pejabat politik). Kepala daerah sebagai pejabat dan politisi ramai-ramai menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan warganya, sebagai sarana untuk menyampaikan informasi, mendengarkan aspirasi masyarakat, membangun hubungan lebih dekat dengan warga dan memperkuat citra mereka. Aktivitas kepala daerah diberitakan dengan konten yang menarik bagi masyarakat (Hutabarat, 2024). Penggunaan media sosial oleh pemerintah daerah maupun oleh pejabat pimpinan daerah tentu bertujuan untuk mewujudkan citra positif pemerintah yang bermuara pada kepercayaan masyarakat.

Pengelolaan media sosial yang melekat pada pemerintah daerah dan media sosial pejabat pimpinan daerah di tiap daerah menyesuaikan dengan kebijakan masing-masing daerah. Pada umumnya, pengelolaan media sosial dalam suatu instansi pemerintahan dilakukan oleh bagian Hubungan Masyarakat (Humas). Humas pemerintah memiliki peran strategis dalam

menyampaikan informasi kepada publik serta membangun citra positif lembaga pemerintah. Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, humas pemerintah bertugas menyelenggarakan fungsi pelayanan informasi dan komunikasi publik, diseminasi informasi kebijakan, serta pengelolaan media komunikasi publik, termasuk media sosial. Humas berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, memastikan bahwa berbagai program dan kebijakan pemerintah dapat tersampaikan secara akurat, jelas, dan tepat waktu melalui berbagai saluran komunikasi, baik konvensional maupun digital (Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika, 2019).

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman merupakan salah satu bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman yang melaksanakan fungsi kehumasan bagi Pimpinan Daerah Kabupaten Sleman. Bagian Prokompim merupakan salah satu humas bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman karena merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman yang melakukan fungsi manajemen dan fasilitas komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sleman. Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Bagian Prokompim mempunyai tugas fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi pimpinan dan dokumentasi pimpinan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Prokompim melaksanakan fungsi pendokumentasian kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sleman serta fasilitasi peliputan media terhadap kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sleman. Bupati dan Wakil Bupati Sleman adalah pimpinan tertinggi lembaga eksekutif di tingkat Kabupaten Sleman. Bupati dan Wakil Bupati adalah personifikasi dari Pemerintah Daerah sehingga aktifitas Bupati dan Wakil Bupati perlu dikomunikasikan kepada masyarakat agar tercipta citra dan reputasi yang positif dari Pemerintah Daerah.

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dengan judul kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dalam Menyusun Program Kerja Kepala Daerah Kota Padangsidempuan (Prasetyo, 2024). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dalam menyusun program kerja Kepala Daerah Kota Padangsidempuan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas, dan masih terdapat faktor penghambat, yaitu pegawai yang belum mampu berinovasi. Selain itu, terdapat pula penelitian berjudul Peran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah dalam Menyusun Agenda Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu(Yusmehendra, 2021). Penelitian ini menunjukkan bahwa peran Bagian Prokompim belum optimal jika dilihat dari indikator penasehat ahli, fasilitator komunikasi, fasilitator proses pemecahan masalah dan daya tanggap. Kedua penelitian tersebut mengenai kinerja dan peran Bagian Prokompim.

Dari penelitian-penelitian terdahulu, kebaruan penelitian ini adalah membahas implementasi salah satu tugas pokok dan fungsi Bagian Prokompim yang berhubungan dengan media peliputan pimpinan daerah. Implementasi fungsi fasilitasi peliputan media terhadap kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sleman yang ada dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah menjadi menarik karena belum ada penelitian yang menggali implementasi fungsi peliputan media di Bagian Prokompim. Selain itu, selama ini fokus penelitian yang telah dilakukan di Bagian Prokompim mengenai media sosial adalah mengenai produk liputan dari media sosialnya seperti jenis komunikasi, *personal branding*, dan *agenda setting* dari media sosial, sedangkan realita mengenai manajemen SDM peliputan, pembagian tugas, deskripsi pekerjaan dan dinamika terjadi dalam Tim Media Sosial yang difasilitasi oleh Bagian Prokompim tersebut tidak pernah diulas. Apalagi terdapat dinamika implementasi ketika pergantian pimpinan daerah karena peristiwa politik yaitu pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak beberapa waktu yang lalu. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan observasi dengan tujuan mengetahui implementasi fungsi peliputan media terhadap kegiatan

pimpinan daerah dan mengetahui dinamika yang terjadi ketika ada pergantian pimpinan daerah. Diharapkan dengan penelitian ini, peneliti dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada Bagian Prokompim pada khususnya dan pemerintah daerah pada umumnya sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Kabupaten Sleman semakin baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah alternatif dalam memperkaya pemahaman serta juga maksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian semisal perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Metode ini lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut (Safarudin et al., 2023). Peneliti melakukan pengamatan fenomena pelaksanaan fungsi peliputan media terhadap kegiatan pimpinan daerah Kabupaten Sleman oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman lalu meneliti substansi makna yang terdapat dalam pengamatan dan menganalisisnya menggunakan teori.

Tempat penelitian adalah Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan adalah salah satu bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman yang melaksanakan fungsi juru bicara Pimpinan Daerah Kabupaten Sleman, melaksanakan fungsi fasilitasi peliputan media terhadap aktivitas Bupati dan Wakil Bupati Sleman dan merupakan bagian dari perangkat daerah di Kabupaten Sleman yang mengelola media sosial institusi pemerintah dan media sosial pimpinan daerah.

Untuk mendapatkan data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara terhadap narasumber, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada Kepala Bagian Prokompim, Ketua Tim Dokumentasi Pimpinan, Pengelola Siaran dan Pengelola Media Sosial Kepala Daerah Kabupaten Sleman. Observasi partisipan dilakukan dengan menjadi bagian dari Bagian Prokompim sedangkan dokumentasi dilakukan dengan mendokumentasikan data seperti postingan media sosial ke dua tim media dan tupoksi tim media.

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari wawancara dan observasi sedangkan data sekunder didapat dari dokumentasi pada postingan media sosial yang melekat pada pemerintah daerah dan media sosial yang melekat pada pimpinan daerah. Postingan diambil pada kontennya sama-sama memberitakan mengenai agenda pimpinan. Dari konten tersebut, peneliti mengetahui perbedaan isi pesan media sosial pada ke dua tim. Data sekunder diintegrasikan dengan data primer kemudian dianalisis dengan teori dan hasil penelitian terdahulu.

Teknik pemilihan informan pada penelitian ini menggunakan teknik purposif yaitu menyesuaikan jenis informasi apa yang ingin didapat dengan narasumber yang dipilih. Teknik validasi data dengan triangulasi sumber yaitu meyakinkan kebenaran data dengan menanyakan satu pertanyaan kepada berbagai informan. Teknik analisis data yang dipakai melalui empat langkah analisis yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada awal berdiri tahun 2011, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokompim) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sleman bernama Bagian Humas, lalu pada tahun 2016 berubah menjadi Bagian Humas dan Protokol. Tahun 2020 Bagian Humas dan Protokol berubah menjadi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sampai dengan sekarang. Perbedaan yang signifikan antara Bagian Humas dan Protokol dengan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan adalah pada pelayanan yang diberikan. Bagian Humas dan Protokol memfasilitasi peliputan media terhadap organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman sedangkan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dikhkususkan untuk melaksanakan pelayanan peliputan media bagi Pimpinan Daerah Kabupaten Sleman (Bupati dan Wakil Bupati). Tugas dan fungsi Bagian Protokol dan komunikasi pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 Tahun 2024 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. Tugas bagian Prokompim adalah menyiapkan bahan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang keprotokolan, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi pimpinan. Sedangkan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dalam melaksanakan tugas tersebut, menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
2. Penyiapan bahan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang keprotokolan, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi pimpinan;
3. Menjalin hubungan dengan berbagai pihak terkait pelaksanaan fungsi juru bicara pimpinan daerah;
4. Penyiapan bahan dan penyampaian masukan kepada pimpinan daerah tentang penyampaian informasi tertentu;
5. Pelayanan informasi dan penjelasan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan kebutuhan dan / atau atas arahan pimpinan;
6. Pelaksanaan penghimpunan dan pengolahan informasi yang bersifat penting dan mendesak sesuai kebutuhan Bupati dan Wakil Bupati;
7. Pengoordinasian penyiapan bahan materi rapat dan kebijakan pimpinan;
8. Penyusunan naskah sambutan dan pidato Bupati dan Wakil Bupati;
9. Pendokumentasian kegiatan Bupati dan Wakil Bupati;
10. Penyusunan notulensi rapat Bupati dan Wakil Bupati;
11. Fasilitasi peliputan media terhadap kegiatan Bupati dan Wakil Bupati;
12. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; dan
13. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan Unit Organisasi sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan tugas dan fungsi di atas, pelaksanaan fungsi fasilitasi peliputan media terhadap kegiatan Bupati dan Wakil Bupati oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokompim) Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman dilakukan melalui pendekatan kelembagaan yaitu penyediaan anggaran dan pembentukan dua jenis tim media. Tim pertama adalah Tim Dokumentasi Pimpinan, yang bertugas meliput dan mendokumentasikan seluruh aktivitas bupati dan wakil bupati dalam kapasitas jabatannya. Tim ini melekat pada struktur formal pemerintahan. Keanggotaan Tim Dokumentasi Pimpinan cenderung lebih stabil karena tidak dipengaruhi pergantian pimpinan siklus lima tahunan. Sistem seleksi pegawai Tim Dokumentasi Pimpinan dilakukan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dengan melibatkan beberapa tahap untuk memastikan kualifikasi dan kesesuaian anggota tim. Tahapan itu meliputi seleksi administrasi, tes kompetensi, wawancara, dan praktik kerja.

Sementara itu, tim kedua adalah Tim Media Sosial Bupati dan Tim Media Sosial Wakil Bupati, yang secara khusus menangani kegiatan pimpinan daerah dalam dimensi yang lebih personal dan informal. Masing-masing tim ini mengikuti ritme dan agenda pimpinan yang bersangkutan, dan keberadaannya cenderung tergantung pada figur pimpinan yang sedang menjabat. Tim Media Sosial Bupati dan Tim Media Sosial Wakil Bupati cenderung tidak stabil karena dipengaruhi pergantian pimpinan siklus lima tahunan. Personalia Tim Media Sosial Bupati dan Tim Media Sosial Wakil Bupati diajukan oleh masing-masing pimpinan daerah kepada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Implikasinya, jika terjadi pergantian pimpinan daerah maka Tim Media Sosial Bupati maupun Tim Media Sosial Wakil Bupati juga akan berubah.

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa pelaksanaan fungsi peliputan media oleh Prokompim Sleman telah menyesuaikan diri dengan perkembangan komunikasi digital, salah satunya melalui pembentukan tim-tim media yang berperan menyampaikan kegiatan pimpinan secara langsung kepada publik. Pola peliputan ini menunjukkan adanya upaya Prokompim dalam beradaptasi terhadap perkembangan zaman, khususnya di era digital yang menuntut kecepatan

dan kedekatan komunikasi antara pemerintah dan publik. Kehadiran media sosial menjadi kanal strategis untuk menyampaikan aktivitas pimpinan secara langsung dan cepat kepada masyarakat luas. Pendekatan ini menandai pergeseran paradigma dari pola komunikasi birokrasi yang kaku ke arah komunikasi yang lebih terbuka, cepat, dan interaktif, terutama melalui media sosial. Sama halnya dengan Pemerintah Kota Bandung dimana Prokompim Kota Bandung juga melakukan adaptasi dengan perkembangan jaman dalam mempublikasikan informasi pemerintah yaitu dengan cara membagikan konten infografis, gambar, video dan juga melakukan interaksi dengan pengikut yang mewakili masyarakat Bandung dengan memanfaatkan fitur-fitur Instagram(Wahyu, 2024).

Kendati demikian, struktur kelembagaan yang mendasari sistem ini belum sepenuhnya kokoh. Tim Media Sosial bersifat personal ditandai dengan kecenderungan postingan pada media sosial pimpinan daerah yang menunjukkan *personal taste* dari liputan kegiatan resmi pimpinan daerah dan selalu berubah mengikuti dinamika pimpinan politik. Fakta ini menunjukkan bahwa keberlangsungan fungsi peliputan media masih sangat rentan terhadap intervensi eksternal. Hal ini menjadi salah satu tantangan utama dalam menjaga stabilitas fungsi komunikasi pemerintahan.

Fenomena menarik muncul saat terjadi pergantian pimpinan daerah akibat pemilihan kepala daerah (pilkada). Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sleman tahun 2024 mengantarkan pemimpin baru untuk Kabupaten Sleman yang pelantikannya berlangsung pada bulan Februari 2025. Dampaknya, Tim media sosial yang sebelumnya mendampingi pimpinan lama digantikan seluruhnya. Ini berarti ada perubahan signifikan dalam manajemen sumber daya manusia dan pengelolaan anggaran Prokompim. Pergantian ini tercatat terjadi secara penuh pada bulan Maret 2025. Kondisi ini menunjukkan situasi ketergantungan terhadap individu, bukan terhadap sistem yang mapan. Pergantian pimpinan berimplikasi langsung terhadap keberlangsungan fungsi peliputan media yang idealnya tetap berjalan tanpa hambatan (terlepas dari siapa yang menjabat). Pola ini menimbulkan risiko terjadinya bias institusional. Ketika media sosial kelembagaan digunakan untuk mengangkat sisi personal pimpinan, maka potensi konflik kepentingan dan pencitraan politik sangat besar. Oleh karena itu, penting untuk merancang sistem komunikasi pemerintahan yang berbasis jabatan dan nilai-nilai netralitas birokrasi agar tidak mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang adaptif, situasi tersebut menggambarkan tantangan tata kelola birokrasi pemerintahan lokal yang masih terpengaruh oleh dinamika politik. Sebagaimana dijelaskan oleh Rusfiana dan Supriatna (2021), stabilitas birokrasi sangat ditentukan oleh faktor internal seperti kultur (budaya) organisasi, kepemimpinan, struktur kelembagaan, dan sistem kerja yang terbangun secara berkesinambungan. Jika tidak dikelola secara strategis, perubahan pimpinan dapat mengganggu kesinambungan layanan dan menghambat pencapaian prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*). Lebih lanjut, tata kelola adaptif harus meningkatkan kapasitas organisasi untuk menghadapi dan beradaptasi dengan perubahan, sekaligus melindungi organisasi yang sama agar tidak menjadi tidak stabil. Strategi tata kelola adaptif meliputi pemanfaatan kemampuan internal dan eksternal, desentralisasi kekuatan pengambilan keputusan, dan upaya untuk menginformasikan keputusan tingkat tinggi dari bawah ke atas. Pada saat yang sama, strategi adaptif dapat menantang stabilitas dan akuntabilitas, yang tetap penting bagi pemerintah. Ini berarti bahwa tata kelola adaptif menyiratkan "tindakan penyeimbangan"(Janssen, 2016). Tata kelola adaptif sebagaimana dijelaskan oleh Janssen (2016), menuntut organisasi pemerintahan untuk memiliki fleksibilitas dalam menghadapi perubahan tanpa mengorbankan kontinuitas. Pada kasus ini, Prokompim menunjukkan adaptasi yang cukup cepat dalam menyesuaikan struktur personel, tetapi belum mampu membangun sistem yang bisa menjamin keberlanjutan fungsi komunikasi publik tanpa bergantung pada figur pimpinan.

Lebih lanjut, dalam konteks teori budaya organisasi, budaya organisasi menurut Robins dan Judge (Rahayu & Juwono, 2021) adalah suatu sistem yang memiliki nilai-nilai bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi itu dengan organisasi lainnya. Dengan adanya budaya organisasi para anggotanya mempunyai nilai prinsip yang sama sehingga diharapkan dapat mempengaruhi mereka dalam membuat keputusan. Robbins dan Judge

menekankan pentingnya kesamaan nilai, stabilitas internal, dan orientasi kolektif dalam membentuk sistem kerja organisasi yang tahan terhadap perubahan. Budaya organisasi yang sehat menurut Robbins dan Judge ditandai oleh kestabilan dan orientasi kolektif, bukan personifikasi sistem. Sedangkan menurut Kreitner dan Kinicki, budaya organisasi dilihat sebagai nilai-nilai dan keyakinan bersama yang mendasari identitas sebuah organisasi. Dalam perspektif teori budaya organisasi, situasi ketergantungan terhadap individu, bukan terhadap sistem yang mapan menandakan belum terbentuknya nilai-nilai bersama yang menjamin kontinuitas kerja, terutama saat terjadi perubahan kepemimpinan. Lemahnya sistem peliputan yang bersifat institusional menunjukkan bahwa budaya kerja di lingkungan Prokompim masih belum sepenuhnya mendukung kesinambungan peran kehumasan, terutama dalam menghadapi siklus politik lima tahunan.

Robbins dan Judge (2017) mengidentifikasi tujuh karakteristik utama budaya organisasi yang dapat digunakan untuk menganalisis sejauh mana nilai-nilai, norma, dan praktik kerja berjalan dalam suatu organisasi. Ketujuh karakteristik ini dapat digunakan untuk memahami dinamika yang terjadi dalam Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokompim). *Pertama*, Inovasi dan keberanian mengambil resiko, yaitu sejauh mana budaya organisasi mampu mengambil resiko dan bagaimana organisasi menghargai tindakan pengambilan resiko. Berdasarkan karakteristik budaya organisasi ini, gambaran budaya organisasi pada Bagian Prokompim adalah bahwa budaya organisasi yang ada belum menunjukkan adanya inovasi mengambil resiko untuk beradaptasi dengan karakteristik dan keinginan pimpinan dengan tetap menggunakan tim media yang sama ketika ada perubahan kepemimpinan. *Kedua*, perhatian kepada hal-hal detail, yaitu budaya organisasi mampu mendorong anggota untuk menjalankan tugas dengan presisi dan perhatian pada hal-hal detail. Budaya organisasi pada Bagian Prokompim belum menciptakan aturan yang jelas apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh tim media pimpinan terlihat dari belum adanya lingkup pekerjaan (*jobdesk*) detail kepada tim media pimpinan. *Ketiga*, Orientasi pada dampak, yaitu sejauh mana organisasi lebih berfokus pada dampak yang timbul daripada proses dalam menghasilkan dampak. Budaya organisasi yang ada berorientasi pada dampak, yaitu terfasilitasinya peliputan media bagi pimpinan daerah. Sejauh ini organisasi lebih berfokus pada dampak yang timbul daripada proses (kestabilan sistem) dalam menghasilkan dampak. *Keempat*, Orientasi pada manusia, dimana organisasi mempertimbangkan keputusan yang diambil terhadap orang-orang yang bekerja dalam organisasi. Budaya organisasi yang ada kurang mempertimbangkan keputusan yang diambil terhadap orang-orang yang bekerja dalam organisasi. Hal ini terlihat pada fenomena penggantian tim media dengan tim media baru pada bulan ke dua dari dua belas kontrak kerja tim media sosial bupati lama. *Kelima*, orientasi pada tim, yaitu sejauh mana kegiatan dalam organisasi dilaksanakan secara tim daripada secara individu. *Keenam*, tingkat keagresifannya, yaitu melihat sejauh mana budaya organisasi mendorong anggota untuk agresif dan kompetitif ketimbang bekerja dengan lambat dan *ketujuh* stabilitas, yaitu melihat kegiatan organisasi berorientasi mempertahankan status quo daripada menekankan pada perkembangan.

Karakteristik ini menilai sejauh mana organisasi mendorong karyawan untuk inovatif dan berani mengambil risiko. Berdasarkan pengamatan pada Bagian Prokompim, budaya organisasi belum menunjukkan keberanian mengambil risiko, terutama dalam hal beradaptasi dengan gaya kepemimpinan baru. Hal ini tercermin dari keputusan untuk tetap mempertahankan tim media yang sama meskipun terjadi perubahan pimpinan daerah, tanpa upaya mengkaji ulang efektivitas atau inovasi pendekatan komunikasi pimpinan baru. Sejalan dengan temuan Sari (2021) dalam *Jurnal Ilmu Komunikasi*, birokrasi pemerintahan sering kali cenderung mempertahankan pola kerja lama untuk menjaga stabilitas, yang menghambat munculnya inovasi. Budaya organisasi idealnya mendorong pelaksanaan tugas secara presisi dan memperhatikan detail. Namun, di Prokompim, belum terdapat aturan tertulis yang jelas terkait ruang lingkup kerja (*job description*) tim media pimpinan. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan tanggung jawab dan potensi konflik peran. Penelitian oleh Lestari (2020) dalam *Jurnal Administratie* menyebutkan bahwa kurangnya SOP dan kejelasan jobdesk dalam organisasi pemerintah berdampak langsung pada efektivitas kinerja dan akuntabilitas internal.

Budaya organisasi di Prokompim cenderung berorientasi pada hasil, yaitu peliputan dan dokumentasi kegiatan pimpinan yang berjalan lancar. Namun, fokus yang terlalu besar pada hasil menyebabkan pengabaian terhadap proses-proses internal, seperti koordinasi, evaluasi, dan pengembangan sistem kerja tim media. Hal ini sejalan dengan kajian Putri dan Nugroho (2022) dalam *Jurnal Manajemen Kinerja*, yang menunjukkan bahwa organisasi pemerintah sering kali menekankan output tanpa memperkuat proses kerja yang mendukung keberlanjutan kualitas layanan. Idealnya, keputusan dalam organisasi mempertimbangkan kesejahteraan dan keterlibatan pegawai. Di Prokompim, keputusan pergantian tim media terjadi pada bulan kedua dari kontrak kerja yang seharusnya berlangsung selama satu tahun, tanpa proses komunikasi internal yang memadai. Ini menunjukkan rendahnya pertimbangan terhadap aspek psikologis dan profesional dari anggota tim. Penelitian oleh Susanto (2020) dalam *Jurnal Administrasi Negara* menekankan pentingnya aspek humanistik dalam manajemen ASN, termasuk kontrak kerja pegawai non-PNS.

Pelaksanaan tugas dalam organisasi idealnya dilakukan melalui kerja tim. Di Prokompim, meskipun secara struktur kerja bersifat kolektif, praktik di lapangan menunjukkan dominasi kerja individual dalam pengelolaan konten media sosial. Belum terlihat adanya pembagian peran yang sistematis berdasarkan keahlian. Hal ini bertolak belakang dengan prinsip komunikasi strategis yang menekankan pentingnya kolaborasi antarperan dalam tim (Kriyantono, 2015). Budaya organisasi dengan tingkat keagresifan tinggi biasanya mendorong kompetisi internal yang sehat dan percepatan kinerja. Namun, budaya di Prokompim cenderung bersifat pasif dan menunggu arahan dari pimpinan, bukan proaktif dalam menyusun strategi komunikasi atau inisiatif konten media sosial. Fenomena ini juga diungkap oleh Iskandar (2019) dalam *Jurnal Komunikasi Publik*, yang menyatakan bahwa banyak instansi pemerintah belum memiliki budaya kerja digital yang adaptif dan cepat terhadap dinamika publik. Karakteristik ini merujuk pada sejauh mana organisasi menekankan stabilitas dan status quo. Prokompim menunjukkan kecenderungan mempertahankan pola kerja lama meskipun ada perubahan lingkungan strategis (seperti pergantian pimpinan). Meskipun stabilitas penting untuk menjaga keberlanjutan, terlalu kuatnya orientasi pada status quo bisa menghambat reformasi birokrasi dan peningkatan performa komunikasi publik.

Dengan demikian, temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan fungsi fasilitasi peliputan media di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sleman masih menemui beberapa dinamika dan tantangan pada implementasiannya. Implementasi fungsi fasilitasi peliputan media oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman tidak hanya ditentukan oleh kecepatan adaptasi terhadap teknologi, tetapi juga oleh kekuatan budaya organisasi, kejelasan struktur kelembagaan, dan keberanian membangun sistem yang tahan terhadap tekanan politik. Ketiganya perlu berjalan seiring agar komunikasi publik yang dikelola oleh pemerintah daerah dapat berlangsung secara profesional, berkelanjutan, dan tidak tergantung pada individu semata.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi fasilitasi peliputan media oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokompim) Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman dilaksanakan melalui pendekatan kelembagaan yang terbagi ke dalam dua bentuk tim media. Tim Dokumentasi Pimpinan berperan sebagai entitas yang melekat secara struktural pada jabatan kepala daerah, dan fokus pada dokumentasi kegiatan resmi Bupati dan Wakil Bupati. Sementara itu, Tim Media Sosial Bupati dan Tim Media Sosial Wakil Bupati bekerja lebih fleksibel dan bersifat personal, mengikuti gaya serta kebutuhan komunikasi masing-masing individu pimpinan. Pola peliputan ini menunjukkan adanya upaya Prokompim Sleman dalam beradaptasi terhadap perkembangan zaman, khususnya di era digital yang menuntut kecepatan dan kedekatan komunikasi antara pemerintah dan publik. Kehadiran media sosial menjadi kanal strategis untuk menyampaikan aktivitas pimpinan secara langsung dan cepat kepada masyarakat luas.

Namun, sistem ini belum sepenuhnya kokoh secara kelembagaan. Hal ini terlihat jelas ketika terjadi pergantian kepala daerah hasil Pemilukada 2024. Tim media sosial yang

sebelumnya mendampingi pimpinan lama digantikan seluruhnya, yang berarti ada perubahan signifikan dalam manajemen SDM dan pengelolaan anggaran Prokompim. Hal ini menciptakan situasi ketergantungan terhadap individu, bukan terhadap sistem yang mapan. Dalam perspektif teori budaya organisasi, ketergantungan ini menandakan belum terbentuknya nilai-nilai bersama yang menjamin kontinuitas kerja, terutama saat terjadi perubahan kepemimpinan. Seperti dikemukakan Robbins dan Judge, budaya organisasi yang sehat ditandai oleh kestabilan dan orientasi kolektif, bukan personifikasi sistem. Lebih jauh, dari kacamata tata kelola adaptif, organisasi pemerintahan idealnya mampu mengakomodasi perubahan dengan tetap menjaga stabilitas fungsi. Pada kasus Prokompim, adaptasi dilakukan secara teknis (dengan merekrut tim baru), namun belum menyentuh sisi struktural dan sistemik. Tidak adanya standar atau regulasi yang menjadikan tim media sosial sebagai bagian tetap dari jabatan fungsional membuat proses komunikasi publik menjadi tidak berkelanjutan. Implikasinya, keberadaan media sosial sebagai alat komunikasi pemerintahan berisiko dimanfaatkan sebagai saluran pencitraan personal. Ini bisa memunculkan bias institusional, karena informasi kelembagaan disampaikan dalam kerangka narasi personal. Jika dibiarkan, hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan dan mengaburkan batas antara fungsi kehumasan dan kepentingan politik individu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adminkab. (2022). *Etika Pengelolaan Media Sosial Instansi Pemerintah*. <https://penajamkab.go.id/etika-pengelolaan-media-sosial-instansi-pemerintah/>
- Hutabarat, J. M. (2024). Media Sosial Menjadi Strategi Politik Masa Kini. *Jurnal Pendidikan Agama Dan Teologi*, Vol.2 No.1, 204–214. <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/jpat.widyakarya.v2i1.2318>
- Iskandar, A. (2019). *Budaya Kerja Digital di Instansi Pemerintah: Antara Kebutuhan dan Tantangan*. Jurnal Komunikasi Publik, 15(2), 155–170.
- Janssen, M. (2016). Tata kelola yang adaptif: Menuju pemerintahan yang stabil, akuntabel dan responsif. Elsevier, Vol.33, pAGE 1-5. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2016.02.003>
- Kriyantono, R. (2015). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Lestari, S. (2020). *Pengaruh Kejelasan Job Description terhadap Efektivitas Kinerja Pegawai di Instansi Pemerintah*. Jurnal Administratie, 7(1), 45–56.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelegaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, (2019).
- Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. (2024).
- Prasetyo, T. (2024). *Kinerja Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Dalam Menyusun Program Kerja Kepala Daerah Kota Padangsidempuan*. IPDN.
- Putri, A. D., & Nugroho, R. (2022). *Fokus pada Output dan Pengabaian Proses dalam Organisasi Pemerintah*. Jurnal Manajemen Kinerja, 9(2), 112–125.
- Rahayu, A. Y. S., & Juwono, V. (2021). *Birokrasi dan Governance Teori, Konsep, dan Aplikasinya*. Rajawali Pers.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). *Organizational Behavior* (17th ed.). Boston: Pearson Education.
- Safarudin, R., Zulfamanna, Kustanti, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Kualitatif. *Innovative : Journal Of Social Science Research*, Vol.3(No.2), 9680–9694. <https://j-innovative.org/index.php/innovative>
- Sari, M. (2021). *Stabilitas vs Inovasi dalam Birokrasi Pemerintahan: Dilema Organisasi Publik*. Jurnal Ilmu Komunikasi, 19(1), 67–80.

- Susanto, E. H. (2020). *Manajemen Humanistik dalam Kontrak Kerja Pegawai Non-PNS*. Jurnal Administrasi Negara, 12(3), 201–214.
- Wahyu, M. A. (2024). *Stratefi Komunikasi Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Bandung dalam Mempublikasikan Kegiatan Pemerintah Melalui Akun Instagram @halobandung Kepada Publik*. Unikom.
- Yusmahendra, A. (2021). *Peran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah dalam Menyusun Agenda Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu*. Universitas Islam Riau.